

Konsep “Parigeuing” dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno

Rangga Saptya Mohamad Permana¹, Elis Suryani Nani Sumarlina²,
Undang Ahmad Darsa³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Pada naskah-naskah Sunda kuno terdapat konsep “parigeuing”. Naskah-naskah yang memuat konsep “Parigeuing” tersebut adalah *Amanat Galunggung* (AG), *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP), *Sanghyang Hayu* (SH), dan *Sanghyang Siksakanda ‘Ng Karesian* (SSK). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kearifan lokal kepemimpinan Sunda yang disebut “Parigeuing” yang tertera dalam naskah-naskah Sunda kuno abad ke-16 M. Metode penelitian deskriptif analisis, diimplementasikan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam naskah Sunda kuno. Selain itu, digunakan pula metode kajian kritik teks, kajian budaya, dan komunikasi politik, untuk mengkaji dan menganalisis kandungan isi naskah, sesuai dengan bahasan yang berkaitan dengan konsep “Parigeuing” dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik. Sumber data primer berupa empat buah edisi teks naskah Sunda kuno abad ke-16 M dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Hasil yang didapat berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan komunikasi politik dari keempat naskah dimaksud, pada dasarnya sejalan. Berdasarkan naskah SH, seorang pemimpin yang ideal harus menjiwai “Tiga Rahasia” yang terdiri dari lima bagian dalam lima belas karakter yang harus terinternalisasi dalam diri seorang pemimpin, dan menjalankan prinsip “Astaguna”. Pemimpin ideal dalam naskah SSK, harus memiliki sifat “Dasa Prasanta”, yang di dalam dirinya sudah melekat karakter kepemimpinan “Pangimbuhning Twah”. Dalam teks naskah FCP, antara ketiganya harus menjiwai karakternya masing-masing. Prebu harus “ngagurat batu”, Rama harus “ngagurat lemah”, dan Resi harus “ngagurat cai”. Selain itu, pemimpin ideal pun harus menjauhi “Opat Paharaman” dan “Catur Buta”. Seluruh karakter pemimpin dalam konsep Parigeuing tersebut dapat diwujudkan dalam komunikasi politik yang efektif dan bernilai.

Kata-kata Kunci: *Parigeuing*; kepemimpinan; komunikasi; politik; naskah Sunda kuno

“Parigeuing” concept within leadership and political communication context on ancient Sundanese manuscript

ABSTRACT

In ancient Sundanese manuscripts, there is a concept of “parigeuing,” which were present in the manuscripts of *Galunggung* (AG), *Carita Parahyangan Fragment* (FCP), *Sanghyang Hayu* (SH), and *Sanghyang Siksakanda ‘Ng Karesian* (SSK). This study aims to uncover the local wisdom of Sundanese leadership called “Parigeuing,” as written in the ancient Sundanese manuscripts of the 16th century AD. The descriptive-analytical research method is implemented to describe the data in the ancient Sundanese manuscripts. Text criticism, cultural studies, and political communication are being used to study and analyze the text’s contents, following the discussion related to the concept of “Parigeuing” in the context of leadership and political communication. The primary data sources are four editions of the ancient Sundanese text of the 16th century AD and their Indonesian translations. The results obtained relating to leadership, and political communication concepts from the four texts are consistent. Based on the SH script, an ideal leader must be living up to the “Three Secrets,” which consists of five parts in fifteen characters that must be internalized in a leader and carry out the principle of “Astaguna.” The ideal leader in the SSK script must have the character of “Dasa Prasanta,” which is inherent in the leadership character from “Pangimbuhning Twah.” In the FCP text, the three of them must animate their respective characters. Prebu must “ngagurat batu,” Rama must “ngagurat weak,” and Rama must “ngagurat cai.” In addition, ideal leaders must stay away from “Opat Paharaman” and “Catur Buta.” The real character of a leader in the “Parigeuing” concept can be manifested in what should be an effective and valuable political communication.

Keywords: *Parigeuing*; leadership; communication; political; ancient Sundanese script

Korespondensi: Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom. Universitas Padjadjaran. Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Jatinangor, 45363. Email: rangga.saptya@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Bahasan yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan komunikasi politik, secara umum mungkin sudah banyak diteliti dan ditulis dalam berbagai artikel. Namun, tidak demikian halnya dengan konsep kepemimpinan dan komunikasi politik zaman dahulu yang terkuak dalam naskah Sunda kuno, sebagai *tinggalan* budaya masa lalu.

Naskah Sunda kuno sebagai dokumen budaya masa lampau, keberadaannya kini semakin sulit ditemukan dan tidak banyak orang yang memahami aksara, bahasa, maupun latar belakang budayanya. Padahal isi yang terkandung dalam naskah dimaksud sangat penting dan masih sangat relevan diimplementasikan saat ini, karena mengungkap informasi gagasan, ide, pikiran, pengetahuan, dan perasaan. Di samping itu, naskah mengungkap sejarah perkembangan budaya masa lalu dari sekelompok atau sosial pada zamannya, yang meliputi religi, teknologi, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, bahasa, dan seni (Sumarlina, 2018).

Generasi muda penerus bangsa selayaknya berperan serta memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokal tinggalan budaya nenek moyang ikut berperan serta meneliti, mengkaji, dan mengenalkan kembali kearifan lokal leluhur masyarakat Sunda tersebut. Salah satu kearifan lokal tersebut terpendam dalam naskah Sunda kuno, yakni berhubungan dengan masalah *Parigeuing* (kepemimpinan) dan komunikasi politik yang digunakan pada masa lampau.

Penelitian ini mengacu kepada teori kepemimpinan Charliyan (2015), Suryalaga (2009), Thoha (2013), dan Sumarlina (2012 & 2018). *Parigeuing* dalam empat naskah Sunda kuno ditulis di atas *lontar*. Meskipun sebenarnya selain *lontar*, *nipah* atau *gebang* juga seringkali digunakan sebagai media perekam teks dari naskah Sunda kuno (Gunawan, 2015). Naskah tersebut beraksara serta berbahasa Sunda kuno dan secara umum berfungsi sebagai salah satu medium untuk merekam informasi, melalui simbol-simbol (aksara dan bahasa) yang terkandung di dalamnya.

Bahasa muncul dalam dua bentuk dasar, yakni “lisan” dan “tulisan”. Beberapa bahasa di dunia tidak pernah direkam dalam bentuk tertulis, dan dengan demikian ditransmisikan dalam bentuk lisan, sementara yang lain juga

memiliki metode untuk melestarikan bentuk mereka menggunakan sistem simbol (Robson, 2011). Ungkapan “sastra lisan” paling sering digunakan untuk menunjukkan bentuk-bentuk ekspresi yang dapat ditemukan baik dalam masyarakat tanpa tulisan atau secara paralel dengan tradisi panjang dari “sastra tertulis” (Pelras, 2016). Salah satu tradisi “sastra lisan” asli khas masyarakat Sunda adalah “*Carita Pantun*”, yang diyakini telah eksis sejak tahun 1518 Masehi (Koswara et al., 2016).

Simbol-simbol visual selain tulisan yang terkandung dalam medium lainnya juga bisa merepresentasikan makna, misalnya saja berdasarkan penelitian Aciri dan Jordaan, yang menunjukkan ikon atau simbol-simbol para dewa yang terukir di Candi Siva, kompleks Candi Roro Jonggrang, dapat merepresentasikan kisah *Ramayana* secara naratif (Aciri & Jordaan, 2012). Pendeknya, banyak sekali informasi mengenai kearifan lokal yang dapat digali dan dimanfaatkan pada saat ini, baik itu melalui naskah, prasasti, atau medium lainnya, karena masa lalu dapat dijadikan rujukan untuk tindakan kita selanjutnya (Sumarlina, 2017).

Naskah Sunda kuno, selain berkaitan dengan aspek-aspek kepemimpinan ada juga yang membahas mengenai kekuasaan. Salah satunya dibahas dalam hasil penelitian Permana yang mengungkap sistem kekuasaan dan sistem pembagian kekuasaan Kerajaan Sunda berdasarkan teks naskah *Fragmen Carita Parahyangan* (Permana, 2015). Naskah Sunda kuno lainnya juga menjadi sumber primer dalam penelitian berkaitan dengan topik ini adalah penelitian yang mengungkap masalah gender, bahwa wanita itu hebat, dibuktikan dengan figur Batara Hiyang Janapati (Sumarlina, 2017). Abstrak Kehidupan masyarakat Indonesia dominan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Dalam, persepsi struktur sosial masyarakat, perempuan selalu dipandang sebelah mata. Di Indonesia juga ditengarai banyak perempuan yang tertindas dan dilecehkan. Perempuan dalam budaya patriarki selalu dianggap tidak berdaya dan harus selalu bergantung kepada laki-laki, dalam pribahasa bahasa Sunda, ada pribahasa yang berarti mengharuskan perempuan ada dalam kelas kedua setelah laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan diposisikan ada dalam ranah domestik, yang aktivitas

dan perkerjaannya dibatasi hanya seputar sumur, dapur dan kasur. Tugas perempuan hanya melayani suami, berada di rumah dan mengurus anak. Namun saat ini, seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman, peran dan kedudukan perempuan (Sumarlina, 2017). Ia adalah ‘pemimpin’, yang berperan sebagai Ratu Galunggung, panglima angkatan perang Kebataraan Galunggung, sekaligus sebagai guru agama pada masanya, dan diberi gelar *Sang Sadu Jati*,

Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Rohim, mengungkap kebenaran dalam konteks *munakahah* (pernikahan) berdasarkan naskah Sunda *Carios Tamim (CT)* (Rohim, 2013). Bahkan, naskah Sunda juga terbukti menjadi salah satu medium dalam rangka Islamisasi Nusantara. Salah satunya tertuang dalam hasil penelitian Rohmana, di Tanah Sunda, sejumlah naskah menggambarkan “kreativitas sufistik” melalui media *dangding*, *wawacan*, atau *guguritan*, abad ke-18 sampai abad ke-19 (Rohmana, 2017).

Konsep utama dalam penelitian ini, *Parigeuing*, atau istilah kepemimpinan dalam Sunda, secara umum, definisinya seringkali mengarah pada interpretasi yang berbeda. Namun, kepemimpinan biasanya hadir dalam berbagai konteks yang berbeda (sosial, lingkungan, ekonomi, organisasi dan lain-lain). Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena kepemimpinan, mengingat beberapa implikasinya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral dalam lingkungan organisasi, politik, ekonomi dan sosial.

Kepemimpinan telah menjadi topik yang menarik sejak jaman dahulu, meskipun baru dimulai dengan sungguh-sungguh pada abad ke-20 ketika perspektif psikologi bertahan dan tetap kuat sampai hari ini, terutama di wilayah Amerika Utara (Fairhurst & Connaughton, 2014). Selain itu, akhir-akhir ini banyak peneliti memperlakukan bahasa sebagai pertanyaan metodologis dan jendela ke makna budaya. Fokus linguistik juga memungkinkan para ilmuwan untuk memikirkan kembali pendekatan tradisional untuk mengungkapkan rincian yang lebih beragam tentang bagaimana isu-isu kepemimpinan “dibawa keluar” dalam konteks-konteks budaya (Aritz & Walker, 2014).

Pencarian pada basis data Scopus (semua bidang pengetahuan dipertimbangkan, dan

deskriptor “kepemimpinan” dapat dimasukkan dalam judul artikel, dalam abstrak, atau kata kunci. Hanya makalah atau ulasan yang diterbitkan sejak 1964 yang dipertimbangkan), di April 2015, istilah “kepemimpinan” dikirim ke lebih dari 78.000 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam *database* dalam 50 tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa cukup sulit untuk menetapkan konsensus mengenai masalah kepemimpinan. Ada banyak pendekatan terhadap konsep tersebut, yang membuatnya sulit untuk menemukan konsep tunggal yang memahami berbagai makna yang tersirat oleh istilah tersebut (Besen et al., 2017).

Dari sekian banyak definisi dimaksud, Stogdill menegaskan, hanya ada tiga golongan kepemimpinan (Bass & Bass, 2008). Berkaitan dengan definisi kepemimpinan. Locke menyatakan kepemimpinan adalah proses menggerakkan orang lain (pengikutnya) melalui konsep yang terarah (Charliyan, 2015). Secara konvensional, para pemimpin menunjukkan jalannya, dan pengikut mewujudkannya (Tourish, 2014). Gardner menyatakan seorang pemimpin adalah yang harus melakukan sesuatu (Thoha, 2013).

Dalam konteks organisasi, terdapat konsep *transformational leadership*, jenis kepemimpinan ini memberikan perspektif alternatif untuk kepemimpinan transaksional, menekankan hubungan pertukaran berbasis otoritas dan imbalan serta hukuman berbasis kontingensi (Neufeld et al., 2010). Komponen-komponen kepemimpinan transformasional, yaitu: (1) pengikut (2) *inspirational motivation* (pemimpin memotivasi pengikut mereka, memberi semangat, menginformasikan manfaat pada setiap pekerjaan pengikutnya); (3) *intellectual stimulation* (pemimpin merangsang pengikut dengan mendorong mereka untuk menjadi kreatif dan mengkritisi kepercayaan lama mereka terhadap sebuah metode/cara); dan (4) *individualized consideration* (pemimpin memperhatikan kebutuhan masing-masing individu melalui komunikasi dua arah). *Transformational leadership* berkaitan erat dengan komunikasi. Komunikasi bukan hanya dapat meminimalisir ketidakjelasan, tetapi juga dapat membentuk organisasi, yang disebut dengan istilah *communications constitute organization* oleh Robert McPhee (Gusfa et al., 2019). Kepemimpinan dapat diartikan kemampuan menggerakkan dan memengaruhi

orang banyak (Ardial, 2010).

Kepemimpinan memiliki perilaku dengan mengedepankan pengikutnya. Hal ini berhubungan dengan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentunya memiliki ciri, gaya, dan keunikan masing-masing, sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan menentukan bagaimana memengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2013). Barrett (2006), dan Müller & Turner (2010), menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dapat diklasifikasikan dalam 6 kategori besar, yaitu: (1) *directive*; (2) *pacesetting*; (3) *participative*; (4) *visionary*; (5) *coaching*; dan (6) *affiliative*. Kerzner (2009) menambahkan dua gaya lebih lanjut, yaitu *bureaucratic* dan *laissez faire* (Zulch, 2014).

Psikologi sosial mengembangkan beberapa teori kualitatif tentang bagaimana kinerja para pemimpin dalam kelompok. Teori kontingensi dikembangkan dalam oposisi terhadap pendekatan "sifat kepemimpinan" - berfokus pada sifat interaksi antara pemimpin dan pengikut. Menurut teori ini, efektivitas jenis kepemimpinan tertentu bergantung pada situasi dan kondisi situasi terhadap jenis itu. Teori kontingensi mengidentifikasi beberapa jenis utama pemimpin, yaitu: (1) Kepemimpinan *Laissez-Faire* ditandai oleh bimbingan yang relatif lemah dari pengikut otonom. Ini biasanya terjadi dalam sistem seperti kelompok-kelompok ilmiah; (2) Pemimpin partisipatif (demokratis) sangat memengaruhi pengikut mereka, tetapi mendorong dan menerima umpan balik dari mereka; dan (3) Pemimpin otokratis, ditandai dengan tidak adanya umpan balik (dari mayoritas pengikut), dan jenis kepemimpinan ini biasanya ada dalam militer, bisnis, dan sistem pemerintahan (Allahverdyan & Galstyan, 2016).

Salah satu kunci penting dari kepemimpinan adalah komunikasi. Seorang pemimpin yang bagus dan disegani oleh pengikutnya/khalayaknya/rakyatnya hampir dapat dipastikan memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif, baik itu dalam tataran antarpribadi, kelompok, organisasi, maupun publik. Meskipun demikian, berkomunikasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dan melakukannya dengan

kepekaan terhadap orang lain, tetap merupakan keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Bagi para pemimpin, peningkatan berkelanjutan untuk pengembangan keterampilan komunikasi sangat penting (Delvis, 2014). Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi secara efektif, karena hampir 90% pekerjaan rutin sehari-hari pimpinan organisasi adalah tindakan komunikasi (Mulyana et al., 2019).

Seorang pemimpin, terutama yang memiliki jabatan dan kekuasaan formal dalam sebuah lembaga, tidak akan bisa terhindar dari proses pertukaran pesan dalam bentuk aktivitas komunikasi politik. Secara singkat, jika dipandang dari perspektif pemerintahan/negara, komunikasi politik bisa diartikan sebagai "komunikasi dari yang memimpin kepada yang dipimpin, atau sebaliknya". Lebih jelasnya, seluruh aktivitas bernuansa politis yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga pendukungnya, atau rakyat pada umumnya, termasuk ke dalam bentuk komunikasi politik (Susanto, 2013). Dari perspektif khalayak secara umum, komunikasi politik bisa dikatakan adalah sebuah proses di mana orang-orang belajar untuk mengadopsi norma, nilai, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh sistem (politik) yang sedang berjalan (McLeod & Lee, 2016).

Seorang pemimpin juga menggunakan komunikasi politik dalam berbagai konteks untuk menyebarkan ideologinya sebagai kekuatan (*power*) di lingkungannya secara berkelanjutan (Yodiansyah, 2017). Komunikasi politik yang terkait dengan kekuasaan, ideologi, dan demokrasi telah membawa komunikasi ke ranah yang lebih luas dan multidisiplin, sehingga masuk ke dalam konteks "komunikasi makro" (Nurussaadah & Sumartias, 2017). Terkait dengan demokrasi, cara ini dianggap sebagai ideologi yang paling ideal, karena penentuan "pengisi tampuk pimpinan" ditentukan berdasarkan daulat rakyat; sebaliknya, demokrasi juga tidak lepas dari kekurangan, dipandang dari sifatnya yang tidak murni sebagai sistem politik yang dengan benar diterapkan oleh rakyat (Senova, 2016).

Dalam konteks kenegaraan, aktivitas komunikasi politik juga tidak dapat dilepaskan dari dua peserta komunikasi dalam sistem komunikasi vertikal, yakni pemerintah dan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan

di lingkup pemerintahan (Pratamawaty et al., 2019). Istilah “Komunikasi Pemerintah” sering digunakan hanya merujuk pada komunikasi eksekutif tingkat atas. Tetapi ia juga dapat digunakan untuk merujuk pada lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan tugasnya di tingkat nasional, regional, dan lokal. Komunikasi pemerintah mengacu pada tujuan, peran, dan praktik komunikasi yang diterapkan oleh politisi dan pejabat eksekutif lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan dasar pemikiran politik, dan dengan sendirinya merupakan dasar persetujuan langsung atau tidak langsung rakyat dan kewajiban untuk melaksanakan kehendak mereka (Canel & Sanders, 2016).

Konteks atau bahasan mengenai konsep kepemimpinan dan komunikasi politik secara umum cukup banyak dibahas. Namun, tidak demikian halnya dengan pengkajian aspek kepemimpinan berbasis naskah. Oleh karena itu, penggalian, penelitian, dan pengkajian terhadap isi naskah Sunda kuno, khususnya yang berkaitan dengan masalah konsep kepemimpinan (“*Parigeuing*”) dalam konteks komunikasi politik, perlu dilakukan, sesuai dengan bahasan artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kearifan lokal kepemimpinan Sunda yang disebut “*Parigeuing*” yang tertera dalam naskah-naskah Sunda kuno abad ke-16 M.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan terhadap analisis teks naskah Sunda kuno, baik secara kodikologis maupun tekstologis melibatkan metode penelitian deskriptif analisis, yang bersifat kualitatif, dengan cara mendeskripsikan detail sebuah fenomena sosial (Sarinastiti & Fatimah, 2019 & Sumarlina, 2019). Metode ini tidak tergantung pada variabel serta melakukan analisis terhadap unit-unit analisis dengan merujuk pada beragam kajian penelitian yang melahirkan data-data kualitatif (Yodiansyah, 2017).

Data dan catatan kebudayaan, termasuk naskah-naskah kuno, harus ditafsirkan, karena di dalamnya banyak terkandung makna-makna penting tentang sejarah masa lalu dan bagaimana manusia masa silam membangun kebudayaan mereka, di mana data budaya termasuk ke dalam konstruksi sosial dan politik (Denzin

& Lincoln, 2017). Ada beberapa kebudayaan material, salah satunya adalah teks-teks tertulis (Hodder, 2009).

Sumber data primer ini adalah naskah-naskah Sunda kuno, maka kajian-kajian yang bersifat filologis juga tidak dapat dihindari. Penelitian filologi secara umum meliputi kajian kodikologis dan kajian tekstologis. Metode penelitian digunakan inventarisasi dan identifikasi data, seleksi data, serta perbandingan data, berdasarkan informasi katalog naskah.

Metode kajian secara tekstologis melibatkan metode kajian kritik teks, melalui edisi landasan, dengan cara mengambil salah satu atau sekelompok teks naskah sebagai dasar suntingan teks. Ini dilakukan untuk mengungkap isi teks yang berkaitan dengan kepemimpinan, meliputi ide, gagasan, etika, sistem pemerintahan, kepemimpinan, pembagian kekuasaan, dan komunikasi politik pada saat naskah itu ditulis atau disalin. Sumber data primer adalah naskah Sunda kuno abad XVI Masehi, hasil edisi dan terjemahan teks dalam bahasa Indonesia. Analisis data dari keempat naskah tersebut berkaitan dengan “*Parigeuing*” atau kepemimpinan dalam budaya Sunda. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kajian-kajian yang di dalamnya berunsur naskah Sunda kuno, kepemimpinan, komunikasi, dan politik.

Data yang telah diidentifikasi, diseleksi, dan dibandingkan, selanjutnya dianalisis serta dibahas secara intersubjektif dengan konsep yang dipilih dalam sumber data sekunder, serta dicari kaitan mengenai bahasan “*Parigeuing*” antarnaskah. Bahasan terdiri atas 4 (empat) bagian, yakni (1) *Parigeuing* dalam naskah *Sanghyang Hayu (SH)*; (2) *Parigeuing* dalam naskah *Sanghyang Siksakanda 'Ng Karesian (SSK)*; (3) *Parigeuing* dalam naskah *Fragmen Carita Parahyangan (FCP)*; dan (4) Karakter-karakter yang pantang dimiliki oleh pemimpin Sunda atau *Opat Paharaman* dan *Catur Buta*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keempat naskah Sunda kuno yang dijadikan sumber data kajian ini ditulis pada abad ke-16 Masehi, terbuat dari lontar atau nipah, beraksara dan berbahasa Sunda Kuno. Isinya secara umum mengungkap tuntunan moral dalam upaya mencapai kebaikan hidup. Berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan

komunikasi politik dalam teks naskah *Sang Hyang Hayu (SHH)*, secara tersurat, merupakan manifestasi dari “tiga rahasia”, terbagi atas lima bagian, masing-masing bagian meliputi tiga sifat, yang dimulai dengan *Kaya* (sehat/kuat) – *wak* (bersabda) – *cita* (hati); karena orang Sunda mengutamakan kesehatan (*cageur*), Pemimpin harus *budi* ‘bijak’, *guna* ‘arif’, *pradana* ‘saleh’, bahwa selain bijaksana, dituntut memiliki kesalehan sosial yang tinggi; *Mata* (penglihatan) – *tutuk* (ucapan) – *talinga* (pendengaran), bahwa antara mata, ucapan, dan pendengaran harus seiring sejalan, *saciduh metu saucap nyata*, apa yang dilihat dan didengar, itu yang harus diucapkan oleh seorang pemimpin; *Bayu* (energi) – *sabda* (ucapan/sabda) – *hedap* (itikad/kalbu dan pikiran), seorang pemimpin harus memiliki itikad atau niat baik, antara kekuatan, ucapan, dengan yang dilakukan. dan *Pratiwi* (bumi) – *akasa* (angkasa) – *antara* (antara); adanya keseimbangan dan kebijaksanaan dalam bertindak. Sifat dan sikap itulah yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya.

Konsep figur seorang pemimpin ideal yang tertuang dalam naskah Sunda kuno, harus memiliki delapan kearifan atau *astaguna*, meliputi (a) *Ahiman* (tegas), ‘*panceg haté*’ (*saciduh metu saucap nyata*) ‘tidak plin-plan; (b) *Animan* (lemah lembut), tidak berperilaku kasar, (c) *Isitwa* (jujur); (d) *Lagiman* (trampil, cekatan, gesit); (e) *Mahiman* (berwawasan luas), harus memiliki pengetahuan dan wawasan luas; (f) *Prakamya*, artinya memiliki keuletan dan ketekunan muupuni, (g) *Prapti* (tepat sasaran), tajam dalam berpikir serta tepat sasaran; dan (h) *Wasitwa*, seorang pemimpin mampu berbesar hati dan arif.

Berdasarkan paparan di atas, bagian (a), (b), dan (h) merupakan sifat yang terkait dengan “emosi”. Emosi adalah keadaan atau sifat individu atau sifat kelompok yang biasanya berisi beberapa komponen – persepsi, kognitif atau evaluatif, ekspresif, fisiologis dan perilaku (Crigler & Just, 2016). Dalam komunikasi politik, suasana hati sangat penting untuk memahami konteks di mana komunikasi terjadi. Emosi sangat penting untuk proses komunikasi dan disampaikan melalui pesan dan saluran yang berbeda. Membangkitkan emosi adalah alat retorika yang ampuh yang digunakan oleh sumber pesan. Tanpa emosi, mustahil menyampaikan pesan-pesan politik,

membentuk preferensi, menungkapkan intensitas pendapat atau bahkan membuat argumen politik. Singkatnya, emosi sangat penting untuk komunikasi dan konstruksi makna politik (Crigler & Just, 2016).

Bagian (c) menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Seorang pemimpin, terutama yang menduduki jabatan formal, memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah berdasarkan situasi dan pemahaman yang logis. Foucault menyebut hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan ini sebagai operasi *bio power*, di mana kekuasaan dan pengetahuan saling bertautan erat satu sama lain secara langsung (Bataona & Bajari, 2017). Bagian (h) juga menunjukkan bahwa pemimpin Sunda harus terbuka dengan kritik; dalam konteks komunikasi politik pemerintahan, hal ini termasuk ke dalam komunikasi *bottom-up* dari rakyat kepada pemerintah. Salah satu syarat menjadi seorang pemimpin yang baik adalah harus berkomunikasi dengan pikiran terbuka dan selalu menyambut saran dan ide (Luthra & Dahiya, 2015).

Lebih lanjut, dalam tatanan makro, seorang pemimpin juga perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat atau jajarannya melalui medium yang tepat, khususnya dalam aktivitas komunikasi politik vertikal yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Salah satu medium yang dapat digunakan untuk saling bertukar pendapat, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan informasi adalah melalui musyawarah. Teori Pengurangan Ketidakpastian (*Uncertainty Reduction Theory/URT*) telah diterapkan dalam berbagai konteks, salah satunya adalah diterapkannya URT pada dinamika komunikasi politik yang melibatkan musyawarah antarpribadi dan kelompok dalam bentuk yang lebih tradisional (Benoit & Holbert, 2015).

Parigeuing terdapat juga dalam kisah pantun, lakon pantun, atau “*seni mantun*” (Koswara et al., 2016). Naskah *Sanghyang Siksakanda ‘Ng Karesian* mengungkap konsep *Parigeuing*, tentang sepuluh pedoman ‘*Dasa Prasanta*’, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin, yakni: (1) *Asih*, seorang pemimpin harus memiliki sifat sayang, cinta kasih, dan iba; (2) *Guna* bijaksana dan adil dalam bertindak, (3) *Hook*, sayang dan mengapresiasi bawahannya; (4) *Karunya*, memiliki sifat empati terhadap bawahan (iba); (5) *Mupreruk*, mampu membujuk dan menentramkan hati bawahan/

rakyatnya; (6) *Ngala angen*, bersimpati ketika bawahannya mengalami musibah atau hal buruk lainnya; (7) *Ngulas*, dapat mengapresiasi bawahannya tatkala mencapai kesuksesan dan hal baik lainnya; (8) *Nyecep*, menyejukan hati bawahannya di kala tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan; (9) *Pésok*, mampu memikat hati atau merasa bangga terhadap bawahan atau rakyatnya; (10) *Ramah*, ramah atau baik hati terhadap anak buah, bawahan atau rakyat yang dipimpinnya,

Proses komunikasi dalam *Dasa Prasanta* dilakukan untuk menciptakan afeksi di antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Afeksi adalah pengalaman merasakan emosi dan sering diukur dalam istilah perbandingan atau evaluatif (positif/negatif atau mendekat/menghindar) (Crigler & Just, 2016). Keberhasilan seorang pemimpin bergantung kepada cara berkomunikasi dengan bawahan atau orang yang dipimpinnya. Komunikasi adalah aspek terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin, manajer, atau pembicara agar dapat berhasil. Bagaimana berkomunikasi dengan bawahan atau dengan orang-orang di sekitarnya. (Răducun & Răducun, 2014). Lebih lanjut, kepemimpinan ideal dilakukan ketika pikiran yang diekspresikan dalam sebuah aktivitas komunikasi (pembicaraan atau tindakan) diakui oleh orang lain sebagai sebuah pesan yang mampu membantu tugas-tugas mereka atau menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka (Mayfield & Mayfield, 2017). Dalam konteks yang lebih makro, Viteritti mengatakan bahwa komunikasi yang bermakna antara pemerintah dan rakyat bukan hanya praktik manajemen. Ia adalah kewajiban politik, serta moral, yang berasal dari perjanjian dasar yang ada antara pemerintah dengan rakyat (Canel & Sanders, 2016).

Pemimpin ideal dalam naskah *Sanghyang Siksakanda 'Ng Karesian* harus memiliki 'pangimbuhning twah 'pamor' atau kharismatik, agar disegani. Seorang pemimpin diikuti bukan semata-mata dari ketundukan dan kharisma (Ardial, 2010). Selain itu, kepemimpinan karismatik dicirikan oleh profil yang mencakup lima dari enam gaya komunikasi. Pemimpin karismatik dicirikan oleh gaya komunikasi yang agresif, meyakinkan, argumentatif, tepat, dan non-agresif (de Vries et al., 2010).

Pangimbuhning Twah atau kharisma

menjadi salah satu penanda karakter seorang pemimpin ideal. Ada dua belas penanda karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, (Suryalaga, 2009; Charliyan, 2015; Suryani, 2009), yang meliputi: (1) *Cangcingan*, seorang pemimpin harus terampil dan cekatan). (2) *Emét*, pemimpin harus memiliki sifat *rikrik gemi* 'tidak konsumtif', mengeluarkan uang sesuai dengan keperluannya.; (3) *Gapitan*, pemimpin harus berani berkorban untuk keyakinan dirinya dan masyarakat atau bawahannya; (4) *Imeut*, pemimpin harus teliti dan cermat dalam menangani suatu masalah atau kebijakan; (5) *Karawaléya*, adalah sifat *béréhan* 'dermawan'; (6) *Langsitan*, seorang pemimpin harus *rapékan*; (7) *Leukeun*, harus rajin, tekun, dan sabar; (8) *Morogol-rogol*, seorang pemimpin harus memiliki semangat tinggi untuk bekerja; (9) *Paka Pradana*, seorang pemimpin harus berani tampil dengan santun, sopan dan beretika; (10) *Purusa ning sa*, pemimpin harus memiliki jiwa pahlawan, jujur, berani demi kebenaran; (11) *Rajeun*, pemimpin harus rajin; dan (12) *Widagda*, pemimpin harus bijaksana, rasional dan memiliki keseimbangan rasa, jangan semena-mena.

Pola kepemimpinan dalam *FCP*, tampak pada figur Trarusbawa. tiga unsur penentu kehidupan di dunia, yang terdiri dari *Prebu*, *Rama* dan *Resi*) (Permana, 2015). Terdiri atas *Prabu* yang dalam sistem pembagian kekuasaan sekarang sama dengan presiden atau kepala pemerintahan, yang memimpin roda pemerintahan (eksekutif), yang harus memiliki sifat *ngagurat batu*, berwatak teguh, taat dan patuh menjalankan aturan dan kenegaraan, teguh dalam pendirian *saciduh metu saucap nyata* 'tidak plin-plan. *Rama*, saat ini setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pusat maupun daerah (legislatif), memiliki sifat *ngagurat lemah*. Sebagai wakil rakyat pembuat undang-undang, harus adil dan bijaksana, Kedudukan *Resi*, yang sekarang setara dengan yudikatif, yang harus memiliki sifat *ngagurat cai*, bersifat menyejukkan dalam peradilan, adil dan untuk kesejahteraan rakyat; Para cendekiawan dan para pendidik/pengajar termasuk kepada golongan ini. Selain itu, *resi* pada zaman dahulu tidak bisa diintervensi dalam masalah hukum oleh golongan manapun, baik ratu maupun rama.

Konsep kepemimpinan dan sistem pembagian kekuasaan yang selama ini

dipopulerkan oleh Montesquieu abad ke-18 Masehi, yang bagi masyarakat awam, mungkin dianggap benar, bahwa pembagian tersebut berasal dari mancanegara Padahal dikenal sejak abad ke-16 Masehi. Ini membuktikan bahwa nenek moyang orang Sunda itu merupakan orang-orang cerdas dan visioner.

Unsur-unsur *Tri Tangtu Di Buana* dalam naskah *SH*, memiliki tanggung jawab untuk *ngretakeun janma reya* ‘menyejahterakan orang banyak; dan *ngretakeun bumi lamba* ‘menyejahterakan dunia’ (Permana, 2015). Selain berhubungan secara intersubjektif dengan naskah *SH*, bahasan mengenai *Tri Tangtu Di Buana* ini juga tertuang dalam naskah *SSK*. Fungsi pemimpin dalam *SSK* berkaitan dengan beberapa kelompok pemimpin berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagaimana terungkap dalam naskah *FCP*.

Seorang pemimpin ideal, dalam perspektif Sunda selain dituntut memiliki karakter baik, mampu menghindarkan empat hal yang buruk/merugikan, disebut *opat paharaman*. Hal negatif pertama *babarian*, pemimpin jangan mudah tersinggung, arogan, cepat marah, ingin menang sendiri, serta mudah dipengaruhi, dan tidak memiliki pendirian. Kedua, *pundungan*, pemimpin jangan mudah merajuk, sehingga sulit bekerja sama. Ketiga *Humandear*, sering berkeluh kesah. Pemimpin yang berperangai demikian akan kehilangan etos kerja, tidak disenangi. Keempat, *Kukulutus*, sering menggerutu. Pemimpin yang demikian berkarakter rendah, karena selalu berfikir negatif, tidak bertanggungjawab, dan memiliki sifat munafik.

Sifat negatif yang harus dihindari oleh seorang pemimpin, dalam naskah *Amanat Galunggung*, sebagaimana dikemukakan (Sumarlina, 2009) adalah *mulah kwanta*, bahwa seorang pemimpin jika berbicara jangan sambil berteriak; *mulah majar laksana*, pemimpin yang baik tidak boleh menyindir orang lain; (3) *mulah madahkeun pada janma*, tidak boleh menjelekkkan orang lain; (4) *mulah sabda ngapus*, pemimpin itu jangan berbohong, harus jujur terhadap rakyatnya atau bawahannya. Sementara itu, Naskah *SSK* mengungkap 5 (lima) sikap pemimpin sebagai abdi, yakni: tidak boleh mengeluh; jangan mudah kecewa; tidak boleh menolak jika diperintah; tidak boleh iri dan dengki, yang harus dijauhi, jika ingin menjadi pemimpin yang baik, disegani,



Sumber: Dokumentasi Penulis, 1998

Gambar 1 Naskah Lontar Fragmen Carita Parahyangan (FCP)

dan berkharisma.

Esensi naskah *Amanat Galunggung (AG)*, pada gambar 2 berisi pemahaman mengenai ajaran hidup yang berwujud nasihat-nasihat yang dituturkan oleh Rakeyan Darmasiksa kepada putranya, yaitu Sang Lumahing Taman, dan pada masyarakat luas pada umumnya (Sumarlina, 2017). Selanjutnya, naskah *AG* menjelaskan tentang *élmu patanjala* ‘ilmu wujud air’, yang menyiratkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi ke masa depan. Tidak mudah terpengaruh oleh bawahan, harus memiliki pendirian, menghindari berbagai godaan, baik dari dalam maupun godaan dari luar, dan tidak boleh mendengarkan hal-hal dan ucapan yang kurang baik.

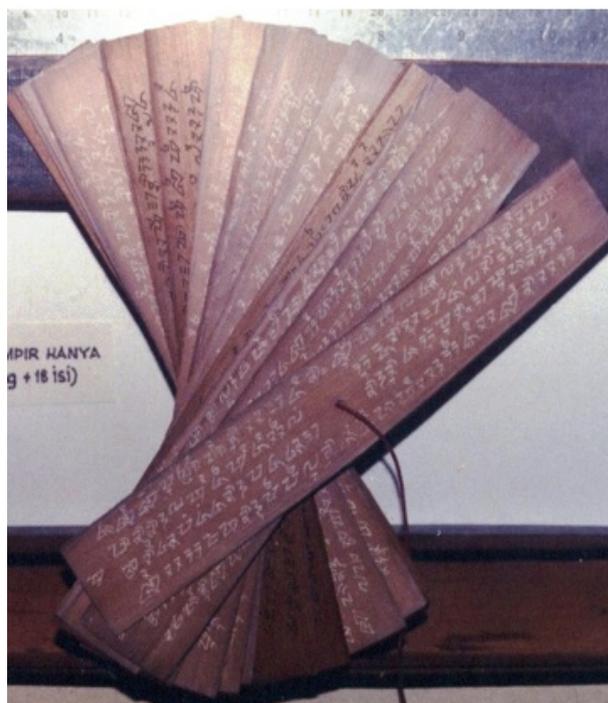
Dalam larangan-larangan di atas, jelas sekali bahwa komunikasi memegang peranan penting, yang esensinya adalah mengajarkan kepada para pemimpin untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sopan, dan efektif. Mayoritas larangan-larangan dalam *opat panyaraman* di atas termasuk ke dalam teknik berkomunikasi. Bagaimanapun juga, seorang pemimpin harus menjadikan setiap aktivitas komunikasinya menjadi bernilai. (Luthra & Dahiya, 2015).

Berkaitan dengan sifat negatif yang harus dihindari oleh seorang pemimpin, naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* memberi isyarat tentang *dasakreta*, yang harus dijaga oleh setiap pemimpin, yang sejalan dengan Q.S. Al-Araaf: 179, yakni harus mampu menjaga mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kulit, lidah, badan, dan aurat, agar terhindar dari bermacam-macam godaan dan mara bahaya. Sikap dan sifat negatif tersebut masih relevan dan harus diimplementasikan oleh seorang pemimpin sampai sekarang. Seorang pemimpin, diasosiasikan dengan empat watak manusia yang berkarakter raksasa perusak kehidupan atau *catur buta*, yakni: (1) *Burangkak*, sifatnya sombong dan tidak beretika, (2) *Mariris*, yaitu tipikal manusia korup, menipu, dan pendusta; (3) *Maréndé*, dideskripsikan sebagai raksasa bermuka api, menimbulkan bencana di masyarakat, karena pemimpinnya memiliki sifat munafik; tampaknya baik, padahal sebaliknya; dan (4) *Wirang*, dideskripsikan sebagai orang yang tidak jujur, ingin menang sendiri, serta senantiasa menyalahkan orang lain.

“*Parigeuing*” ini seyogianya terkandung dan diimplementasikan dalam jiwa setiap pemimpin Sunda, karena dengan menginternalisasikan konsep ini, maka para pimpinan Sunda zaman sekarang dapat mencapai sosok pemimpin ideal yang didambakan rakyat. Kepemimpinan Sunda harus diaktualisasikan dengan komitmen yang tinggi, disertai dengan konsistensi dan komunikasi harmoni dan selaras antara pemimpin dengan yang dipimpin (Sumarlina, 2018a).

Salah satu konsep pemerintahan tradisional Sunda (*Tri Tangtu Di Buana*) tercermin dalam tatanan pemerintahan Baduy di Kanekes, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy dipimpin oleh tiga *kapuunan*, yakni *Puun* Cikeusik, *Puun* Cikartawana dan *Puun* Cibéo. Unsur *Prebu* yang bertindak sebagai pemimpin roda pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh *Puun* Cibéo. *Rama* sebagai golongan yang dituakan atau wakil rakyat (legislatif) dipegang oleh *Puun* Cikartawana. *Resi* yang bertugas memberdayakan hukum agama dan *darigama* (negara) (yudikatif) dipegang oleh *Puun* Cikeusik (Sumarlina, 2016).

Sistem pemerintahan dalam komunitas Baduy selaras dan harmonis. Antara *Prebu*, *Rama* dan *Resi* bersinergi dan saling membantu. Di samping itu, ketiga unsur tersebut dalam



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2000

Gambar 2 Naskah Lontar Amanat Galunggung (AG)

hal-hal tertentu saling menghormati satu sama lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pihak *Prebu* tidak mencampuri kekuasaan *Rama* dan *Resi*, demikian juga sebaliknya. Namun untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan adat istiadat juga tradisi dalam komunitas Baduy, ketiganya senantiasa berembuk dan bermufakat untuk kebaikan bersama.

Sistem pemerintahan komunitas Baduy, merupakan salah satu penjelmaan dari sistem pemerintahan masyarakat Sunda masa lampau, sebagaimana tercermin dalam naskah *FCP*, yang mampu memberikan sebagian gambaran bahwa masyarakat Sunda di masa silam telah memiliki satu taraf kehidupan sosial yang cukup teratur. Hal ini pun membuktikan bahwa kecerdasan nenek moyang Sunda jaman dahulu tidak kalah pandai dan mampu melebihi kecerdasan masyarakat lainnya, karena *karuhun* orang Sunda telah menggunakan sistem pemerintahan Sunda sejak abad ke-15 dan 16 Masehi (Sumarlina, 2016).

Sistem pemerintahan di komunitas adat Baduy tersebut merupakan “cermin” atau “gambaran” dari kehidupan orang Sunda masa

lalu. Sistem pemerintahan masyarakat Baduy telah mewarisi sesuatu di luar perhitungan dan perkiraan mayoritas masyarakat di era modernisasi dan globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengenalan dan pengetahuan masyarakat awam terhadap khazanah pernaknahan bangsa Indonesia sendiri. Naskah Sunda, sebagai dokumen budaya masa silam yang berisi beragam ide, gagasan, perasaan, pengetahuan sejarah, serta budaya dan pemikiran cemerlang *karuhun* (nenek moyang), mengandung kearifan budaya lokal yang hebat, jika para akademisi mampu mengemasnya dengan baik (Sumarlina, 2018).

SIMPULAN

“*Parigeuing*” dalam naskah Sunda Kuno komunikasi politiknya diimplementasikan dengan cara yang santun. Pemimpin yang menjiwai limabelas karakter yang terinternalisasi dalam dirinya, dianggap sebagai figur yang merepresentasikan kepemimpinannya, yang mengedepankan delapan kearifan (*astaguna*). Sementara itu, pemimpin ideal menurut naskah *Sanghyang Siksakanda ‘Ng Karesian*, adalah pemimpin yang menjalankan sepuluh pedoman “*Dasa Prasanta*”, dalam kepemimpinannya, serta kharismatik dan berwibawa, agar disegani dan dicintai rakyatnya.

Sistem pembagian kekuasaan dalam *FCP*, dituntut menjiwai karakternya masing-masing. *Prebu* harus memiliki sifat teguh dalam menjalankan aturan, *Rama* harus mampu menentukan pijakan dengan benar, dan *Resi* harus harus berwatak adil dan menyejukkan, terutama dalam masalah peradilan. Pemimpin yang ideal harus menjauhi empat karakter negatif agar kepemimpinannya berkharisma, serta menghindari tabiat dan perilaku buruk, agar damai dan sejahtera.

Sebuah kepemimpinan tidak akan berjalan dengan sempurna dan ideal jika sang pemimpin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi secara efektif dan bernilai merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, dalam konteks apapun. Dalam tatanan makro, atau komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam konteks kenegaraan (khususnya komunikasi politik berjenis vertikal—*top-down* atau *bottom-up*), komunikasi politik yang

baik juga akan terwujud jika sang pemimpin memiliki karakter-karakter dalam *Parigeuing* ini. Beberapa karakter kepemimpinan dalam *Parigeuing* yang termasuk ke dalam tindakan komunikasi tercermin dalam *Astaguna*, *Dasa Prasanta*, dan *Pangimbuhning Twah*.

Dalam upaya pengenalan kembali nilai-nilai kearifan lokal budaya Sunda, perlu dikembangkannya atau dilakukannya penelitian-penelitian komunikasi yang bersumber dari naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno menyimpan khazanah keilmuan yang beragam dan konsep-konsep kehidupan atau fenomena-fenomena komunikasi yang bahkan masih terbilang relevan hingga saat ini. Lebih lanjut, penelitian-penelitian mengenai kepemimpinan dan komunikasi politik tradisional yang bersumber dari dokumen-dokumen budaya dari masa lampau masih sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, secara umum, penulis menyarankan untuk semakin banyak dilakukan penelitian-penelitian komunikasi yang mengambil tema dan data yang bersumber dari naskah-naskah kuno, karena dapat memperkaya konsep-konsep dan keilmuan komunikasi yang bersifat eklektik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acri, A., & Jordaan, R. (2012). The dikpalas of ancient java revisited: A new identification for the 24 directional deities on the Śiva temple of the Loro Jonggrang complex. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 168(2–3), 274–313. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003562>
- Allahverdyan, A. E., & Galstyan, A. (2016). Emergence of leadership in communication. *PLoS ONE*, 11(8), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159301>
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Aritz, J., & Walker, R. C. (2014). Leadership styles in multicultural groups: Americans and East Asians working together. *Journal of Business Communication*, 51(1), 72–92. <https://doi.org/10.1177/2329488413516211>
- Bass, B. M., & Bass, R. (2008). *The bass handbook of leadership: theory, research, & managerial applications* (4th ed.). Free Press.
- Bataona, M. R., & Bajari, A. (2017). Relasi

- kuasa dan simbol ekonomi-politik gereja dalam kontestasi politik lokal Provinsi NTT. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 121–135. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8831>
- Benoit, W. L., & Holbert, R. L. (2015). Komunikasi politik. In C. R. Berger, M. E. Roloff, & D. R. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *Handbook Ilmu Komunikasi* (pp. 626–649). Bandung: Nusa Media.
- Besen, F., Tecchio, E., & Fialho, F. A. P. (2017). Authentic leadership and knowledge management. *Gestao E Producao*, 24(1), 2–14. <https://doi.org/10.1590/0104-530X898-13>
- Canel, M. J., & Sanders, K. (2016). Komunikasi pemerintah: bidang baru dalam penelitian komunikasi politik. In H. A. Semetko & M. Scammell (Eds.), *Handbook Komunikasi Politik* (pp. 147–169). Bandung: Nusa Media.
- Charliyan, A. (2015). Master leadership. Jakarta: Solusi Publishing.
- Crigler, A. N., & Just, M. R. (2016). Mengukur afek, emosi, dan suasana hati dalam komunikasi politik. In H. A. Semetko & M. Scammell (Eds.), *Handbook Komunikasi Politik* (pp. 385–407). Bandung: Nusa Media.
- de Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., & Oostenveld, W. (2010). Leadership = communication? The relations of leaders' communication styles with leadership styles, knowledge sharing and leadership outcomes. *Journal of Business and Psychology*, 25(3), 367–380. <https://doi.org/10.1007/s10869-009-9140-2>
- Delvis, D. (2014). Communication: a key to leadership. *empathia, Inc.*, 4. <https://www.csun.edu/sites/default/files/LifeMatters-leadership-communication-2014.pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The sage handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Fairhurst, G. T., & Connaughton, S. L. (2014). Leadership: a communicative perspective. *Leadership*, 10(1), 7–35. <https://doi.org/10.1177/1742715013509396>
- Gunawan, A. (2015). Nipah or gebang? A philological and codicological study based on sources from West Java. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 171(2–3), 249–280. <https://doi.org/10.1163/22134379-17101004>
- Gusfa, H., Yuliawati, E., & Wanti, I. (2019). Modelisasi komunikasi konstitutif dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 14–30. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18413>
- Hodder, I. (2009). Interpretasi dokumen dan kebudayaan material. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (Indonesia, pp. 544–557). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koswara, D., Haerudin, D., & Permana, R. (2016). Nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam khazanah sastra Sunda klasik: Transformasi dari kelisanan (orality) ke keberaksaraan (literacy) carita pantun Mundinglaya Di Kusumah (kajian struktural-semiotik dan etnopedagogi). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2), 126–134.
- Luthra, A., & Dahiya, R. (2015). Effective leadership is all about communicating effectively: Connecting leadership and communication. *Internatioanl Journal of Management & Business Studies*, 5(3), 1–6.
- Mayfield, J., & Mayfield, M. (2017). Leadership communication: Reflecting, engaging, and innovating. *International Journal of Business Communication*, 54(1), 3–11. <https://doi.org/10.1177/2329488416675446>
- McLeod, J. M., & Lee, N.-J. (2016). Jaringan sosial, diskusi publik, dan keterlibatan kewarganegaraan: perspektif sosialisasi. In H. A. Semetko & M. Scammell (Eds.), *Handbook Komunikasi Politik* (pp. 361–381). Bandung: Nusa Media.
- Mulyana, A., Hamid, F., Mansur, S., & Susilawati. (2019). Kepemimpinan efektif melalui kompetensi komunikasi di Media Nusantara Citra Group. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 184–197.
- Neufeld, D. J., Wan, Z., & Fang, Y. (2010). Remote leadership, communication effectiveness and leader performance. *Group Decision and Negotiation*, 19(3), 227–246. <https://doi.org/10.1007/s10726-008-9142-x>
- Nurussaadah, E., & Sumartias, S. (2017).

- Komunikasi politik PKS dalam keterbukaan ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43–52. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8522>
- Pelras, C. (2016). Orality and writing among the Bugis. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12(Supp. 1), 13–51. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.3>
- Permana, R. S. M. (2015). Makna Tri Tangtu Di Buana yang mengandung aspek komunikasi politik dalam Fragmen Carita Parahyangan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 173–191. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>
- Pratamawaty, B. B., Dewi, E. A. S., & Trulline, P. (2019). Strategi komunikasi politik dalam sosialisasi kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN di Bandung Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 211–223.
- Răducan, R., & Răducan, R. (2014). Communication styles of leadership tools. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 149(Supp.), 813–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.326>
- Robson, S. (2011). Javanese script as cultural artifact: Historical background. *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 45(1–2), 9–36.
- Rohim. (2013). Dua kebenaran dalam naskah Sunda Carios Tamim. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 21(1), 285–304. <https://doi.org/10.19105/karsa.v21i2.522>
- Rohmana, J. A. (2017). Tasawuf Sunda dalam naskah Asmarandana Ngagurit Kaburu Burit (OR. 7876). *Ulumuna*, 17(2), 231–258. <https://doi.org/10.20414/ujs.v17i2.161>
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat pemilih perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 44–58. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.19125>
- Senova, A. (2016). Literasi media sebagai strategi komunikasi tim sukses relawan pemenangan pemilihan presiden Jokowi-JK di Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(2), 142–153. <https://doi.org/10.24198/jkk.v4i2.7411>
- Sumarlina, E. S. N. (2016). *Baduy: masa kini, Antara Konvensi dan Inovasi*. Bandung: SituSeni.
- Sumarlina, E. S. N. (2017). Batari hiyang janapati dalam perspektif gender. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.26499/jentera.v6i2.177>
- Sumarlina, E. S. N. (2018). *Kearifan lokal budaya sunda dalam media massa cetak Jilid 1*. Bandung: Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N. (2018). *Kearifan lokal budaya sunda dalam media massa cetak Jilid 2*. Bandung: Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N. (2018). *Seni budaya dan kearifan lokal*. Bandung: Raness Media Rancage.
- Suryalaga, H. R. H. (2009). *Kasundaan Rawayan Jati*. Bandung: Yayasan Nur Hidayat.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6041>
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan dalam manajemen*. RajaGrafindo Persada.
- Tourish, D. (2014). Leadership, more or less? A processual, communication perspective on the role of agency in leadership theory. *Leadership*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.1177/1742715013509030>
- Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi politik media surat kabar dalam studi pesan: Realitas politik pada media cetak Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 11–30. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8889>
- Zulch, B. (2014). Leadership communication in project management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 119(Supp.), 172–181. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.021>